

## Lampiran 1

### Transkrip Wawancara di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Nama : Bpk. Haris Sutarta, S.E, M.T  
 Jabatan : Kepala Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah  
 Waktu : 15 Oktober 2012

An : Apa tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman?

HS : Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah, Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah, Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

An : Apa sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Sleman dalam memungut pajak reklame?

HS : Menggunakan *Official Assessment System* yaitu yang menghitung besarnya pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan SPTPD sebagai dasar penetapan pajaknya

An : Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman?

HS : Pemungutannya melalui pendaftaran dulu, kemudian pendataan, penetapan, setelah itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya di kantor Dispenda ini pada bagian loket. *Nah* nanti itu ditangani oleh petugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, misal bidang pendaftaran bertugas melayani wajib pajak yang mau mendaftar sebagai wajib pajak. Bagian seksi pendaftaran nanti produknya adalah Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak melaporkan kewajiban pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan. Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih

terutang pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

An : Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak reklame?

HS : Subjek pajak reklame harus mendaftar menjadi wajib pajak dan membayarkan pajaknya dalam waktu 20 hari setelah reklame dipasang

An : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan?

HS : Banyak juga pemasang reklame yang tidak melakukan pendaftaran wajib pajak di kantor pelayanan terpadu, padahal reklame seperti papan nama lebih dari 1 x 2 meter sudah kena pajak.

An : Bagaimana prosedur pendataan obyek pajak reklame?

HS : Formulir data objek pajak reklame ini sekaligus menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk subjek pajak. Melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini subjek pajak sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak reklame. Setelah formulir data obyek pajak reklame diserahkan kembali kepada petugas data dimasukkan pada sistem informasi dan dikelola serta ditetapkan oleh bidang seksi pendataan yang kemudian dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

An : Bagaimana dengan penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak?

HS : Memang Kami belum secara tegas menerapkan sanksi-sanksi tersebut karena punya banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya, mengurus administrasi pajak daerah saja sudah terlalu banyak dan kekurangan staf petugas untuk 9 pajak daerah kabupaten ditambah untuk masalah seperti ini kami membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol PP.

An : Bagaimana cara pengenaan pajak reklame di Dispenda?

HS : Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dihitung dengan memperhatikan jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame.

An : Bagaimana cara menghitung pajak reklame di Dispenda?

HS : Penghitungannya oleh petugas bidang penetapan, rumusnya adalah dengan mengalikan semua faktor-faktor dasar pengenaan pajak reklame. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 8 tarif pajak reklame yang ditetapkan untuk pajak reklame pada kantor pelayanan pajak daerah Dispenda adalah sebesar 25%.

An : Dimana tempat pembayaran pajak reklame?

HS : Pembayaran pajaknya langsung di Dinas Pendapatan Daerah, di loket bagian depan.

An : Apakah ada tempat pembayaran lain selain di Dispenda?

HS : Bisa melalui ATM atau rekening apabila wajib pajak berada diluar daerah sedangkan reklamenya berada di Kabupaten Sleman.

An : Bagaimana cara pembayaran pajak reklame?

HS : Cara pembayaran pajak reklame wajib pajak datang langsung di kantor pelayanan pajak daerah dengan membawa SKPD, surat itu menunjukkan NPWP dan ketentuan pajak reklame yang harus dibayar wajib pajak.

An : Bagaimana cara pembayaran pajak reklame melalui alat elektronik?

HS : Kalau lewat Bank atau ATM nanti wajib pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menyetorkan pajak ke rekening bendahara yang ditunjuk oleh Dispenda yang digunakan untuk menampung dana pembayaran pajak reklame, setelah itu pajak akan disetorkan oleh bendahara Dispenda kepada Bidang akuntansi (Bidang pembukuan dan pelaporan DPPKAD).

An : Seperti apa bukti pembayaran pajak reklame?

HS : Setelah membayar setoran pajaknya maka nanti wajib pajak akan diberi Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan pelunasan pajak reklame.

An : Seperti apa bukti pembayaran apabila melalui pembayaran elektronik?

HS : Melalui pembayaran elektronik wajib pajak mendapatkan resi atau struk ATM sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak reklame yang sah sebagai pengganti SSPD dilakukan melalui fasilitas ATM sebagai SSPD apabila telah dicantumkan bentuk pengesahan dari petugas penerima pajak.

An : Menurut Bapak, bagaimana sanksi administrasi bagi pelanggar perda izin reklame?

HS : Kalau masalah sanksi memang kami pemerintah daerah sulit untuk menerapkan dan ada beberapa hambatan karena sangat banyak reklame di Kabupaten Sleman ini yang tidak berizin.

An : Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?

HS : Yang pertama keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman seharusnya memiliki 35 panggung reklame tapi sekarang ini hanya tersedia 18 panggung spanduk saja. Yang kedua adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. Ketiga, kurangnya kesadaran wajib pajak.

An : Apa yang menyebabkan keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di Kabupaten Sleman?

HS : Kurangnya panggung reklame itu karena sulit mencari lokasi untuk pemasangan panggung. Sehingga menimbulkan pemasangan reklame tak tertata. Akhirnya banyak spanduk-spanduk yang melanggar pemasangannya, seperti melintang di Jalan. Padahal itu jelas tidak boleh, karena bisa membahayakan pengguna jalan jika spanduk itu putus. Menurut saya, di Sleman memang masih banyak persimpangan. Namun lahan negara sudah dekat dengan jalan sehingga tidak bisa dipasang panggung reklame. Sementara panggung reklame dipasang di tempat-tempat strategis.

An : Apa hambatan-hambatan lainnya?

HS : Kurangnya staf petugas. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memiliki 54 orang pegawai, 12 orang pegawai diantaranya mempunyai tugas melayani wajib pajak dan melayani pembayaran pajak pada loket, dan sisanya 42 orang pegawai mempunyai tugas operasional lapangan. Jumlah

54 orang pegawai ini menangani 9 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sleman ini.” Kemudian kurangnya kesadaran wajib pajak, dan Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat.

An : Apa yang yang dapat memperngaruhi kesadaran wajib pajak?

HS : Ya memang, kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh perilaku pejabat pajak, sejak ditemukan kasus-kasus korupsi masyarakat jadi malas bayar pajak, seperti kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat

An : Bagaimana dengan informasi Pemda kepada masyarakat tentang Perda yang sudah ada?

HS : Pemungutan pajak reklame sudah diatur dalam perda No.04 Tahun 2011 tentang pajak reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang informasi karena menurut mereka penjelasan perda masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari perda tersebut.”

An : Apa upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?

HS : Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan pajak. Kedua Petugasterjun ke lapangan untuk melakukan pendataan.Ketiga, Penertiban dengan Surat Teguran. Keempat, Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) dan SatPol PP.

An : Sosialisasi dilakukan berapa kali dalam satu minggu?

HS : Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan pajak dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman setiap dua minggu sekali sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

An : Seperti apa contoh sistem jemput bola?

HS : Salah satu contoh sistem jemput bola oleh petugas adalah petugas langsung datang ke toko-toko yang memasang reklame jenis baliho yang melekat /menempel atau memasang reklame jenis billboard didepan toko.

An : Seperti apa bentuk surat teguran untuk menertibkan?

HS : Biasanya berupa surat teguran secara resmi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame, tapi juga bisa berupa peringatan secara tidak resmi yaitu dengan menempelkan stiker atau tulisan yang berbunyi tidak membayar pajak pada papan reklame yang dipasang.

An : Bagaimana dengan pengawasan di lapangan yang dilakukan Pemda?

HS : Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu, tujuannya agar kami mengetahui reklame-reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah dibantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman bagian seksi pengawasan dan pengendalian.

An : Apa tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam hal pengawasan?

HS : Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, SatPol PP tuganya adalah melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak.

An : Bagaimana koordinasi antara Dispenda, Dinas PUP dan SatPol PP?

HS : Rapat koordinasi dilakukan tergantung kebutuhan saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban. Tujuannya adalah untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Sleman yang dirasa bermasalah dan membahas anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan penertiban reklame.

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Nama : Bpk Dendra Sunanto, S.T  
 Jabatan : Staf bagian Seksi Perizinan Bangunan DPUP  
 Waktu : 29 Oktober 2012

An : Apa tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) yang berkaitan dengan perizinan reklame?

Dd : Bidang kami adalah penataan bangunan, tugas bagian seksi perizinan bangunan adalah melakukan pelayanan izin, termasuk mengeluarkan izin bangunan reklame, tugas bagian pengendalian bangunan adalah mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin.

An : Bagaimana prosedur izin mendirikan bangunan reklame?

Dd : Ada beberapa prosedur izin, ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung karena mulai tahun 2012 prosedur izin reklame sama dengan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB (memperlihatkan bagan atau gambar prosedur izin reklame)

An : Bagaimana dengan perpanjangan izin yang disertai dengan perubahan konstruksi atau yang lainnya?

Dd : Kalau perpanjangan izin disertai perubahan maka harus melalui proses permohonan izin penyelenggaraan reklame yang baru.

An : Berapa lama izin dikeluarkan oleh DPUP?

Dd : Proses perizinan reklame dilakukan selama 14 hari kerja, baru bisa dikeluarkan izinnya apabila syarat-syaratnya sudah dilengkapi, kalau *cuman* perpanjangan saja pemohon tidak boleh merubah ukuran, konstruksi, lokasi reklame, dan jenis reklamenya.

An : Mengapa di lapangan ditemui prosedur izin yang berlarut lama? Bisa lebih dari 14 hari kerja?

Dd : ya... karena pemohon itu mengajukan izin, kadang-kadang diberitahukan kepada pemohon kalau kekurangan syarat, tapi dari pihak pemohon tidak segera melengkapi jadi malah saling menunggu sehingga prosesnya jadi lama bisa lebih dari 14 hari kerja.

An : Apakah masyarakat/pemohon tersebut sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada?

Dn : Ada beberapa pemohon yang mengajukan izin tapi lokasinya itu sudah terlalu banyak reklame, kalau reklame menumpuk itu sebenarnya tidak kami izinkan karena dapat mengganggu pandangan pengendara. Menurut saya mereka hanya terfokus pada lokasi itu dan gak mau mengikuti saran kami untuk pindah ke lokasi lain

An : Apa yang menjadi faktor tidak dikeluarkan izin reklame?

Dd : Faktor yang menyebabkan tidak dikeluarkannya izin reklame adalah kurang syarat, posisi menutupi reklame yang lain dan rambu lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, ada keberatan dari masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena kurang syarat, misalnya konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan izin mendirikan bangunan reklame, kemudian posisi reklame menutupi reklame, ini disebabkan karena pemohon hanya terfokus pada tempat-tempat yang sudah dipenuhi reklame lain atau tidak mau mencari tempat lain seperti contohnya jalan gejayan, babarsari, faktor yang lain adalah mengganggu arus lalu lintas, dan yang terakhir adanya keberatan dari masyarakat.

An : Bagaimana solusi untuk menangani hal tersebut?

Dd : Sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah menyediakan papan untuk pemasangan spanduk, SatPol PP Kabupaten Sleman sudah sering melakukan penertiban spanduk tetapi kenyataan dilapangan banyak pihak periklanan yang masih memasang spanduk pada tempat-tempat yang bukan semestinya. Hari ini di tertibkan besok sudah muncul lagi, begitu seterusnya.

An : Mengapa reklame di Kabupaten Sleman ini masih terlihat belum tertata?



Dd : Reklame di Kabupaten Sleman terlihat semrawut (kurang tertata) karena banyak reklame yang tidak berizin dan belum adanya pedoman penataan reklame. Saat ini sedang disusun aturan tentang penataan reklame”.

An : Bagaimana tindakan DPUP menangani hal tersebut diatas?

Dd : Tindakan DPUP adalah menertibkan reklame yang tidak berizin, Sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah menyediakan papan untuk pemasangan spanduk, SatPol PP Kabupaten Sleman sudah sering melakukan penertiban spanduk tetapi kenyataan dilapangan banyak pihak periklanan yang masih memasang spanduk pada tempat-tempat yang bukan semestinya. Hari ini di tertibkan besok sudah muncul lagi, begitu seterusnya.

An : Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan reklame?

Dd : Saya rasa di Kabupaten Sleman ini masyarakatnya masih kurang paham terhadap penataan reklame, sampai sekarang papan reklame belum teratasi, baik itu sifatnya billboard maupun spanduk yang tidak tertata dengan baik. Hal itu salah satu penyebab reklame di Kabupaten Sleman ini kurang tertata dengan baik.

An : Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dispenda dan DPUP?

Dd : Dipenda berkoordinasi dengan DPUP dalam hal penanganan izin reklame yang belum berizin dengan memberikan data reklame yang sudah membayar pajak namun belum mengajukan izin, karena bukti pembayaran pajak reklame bukan merupakan izin reklame.

An : Peraturan penataan reklame yang seperti apa yang diharapkan Dinas PUP kedepannya?

Dd : Pertama adalah penataan papan reklame harus sesuai dengan kondisi kota, kultural masyarakat, dan kenyamanan masyarakat. “Yang kedua desain reklame harus disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat sehingga diperlukan adanya pengaturan isi dan desain reklame yang etis dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dan yang ketiga pemerintah perlu memperbanyak iklan layanan masyarakat yang mengusung pesan moral untuk mengimbangi iklan-iklan bersifat komersil. Dengan

begitu diharapkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai moral tetap terjaga.

An : Bagaimana dengan sanksi untuk pemasang reklame yang tidak berizin?

Dd : Kalau masalah sanksi memang kami pemerintah daerah sulit untuk menerapkan dan ada beberapa hambatan karena sangat banyak reklame di Kabupaten Sleman ini yang tidak berizin

An : Apa upaya yang dilakukan Dinas PUP untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perizinan reklame?

Dd : Masterplan bukan hanya mengetahui jumlah pasti titik reklame, tetapi juga agar penempatannya tidak semrawut. Padahal, reklame ini menjadi salah satu sumber potensi pendapatan daerah, seharusnya reklame-reklame bisa ditata dengan baik. Kemudian Penataan reklame dibantu oleh SatPol PP dengan menertibkan reklame yang lokasi pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan, membongkar reklame-reklame liar yang tidak berizin.

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara di Perusahaan Biro Periklanan di Kabupaten Sleman

Nama : Bpk Iskandar  
 Jabatan : Karyawan PT.Karka Abiyatsa  
 Waktu : 12 November 2012

An : Apa saja tugas biro periklanan dalam kaitannya dengan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman?

Ir : Tugas kami adalah menyelesaikan pekerjaan pemasangan reklame, dari mulai proses izinnya sampai membayarkan pajak reklame pengiklan.

An : Menurut anda bagaimana pelayanan izin reklame di Kabupaten Sleman?

Ir : Kalau ngurus izin reklame tu lama bisa nyampe sebulan lebih belum dikeluarin izinnya, padahal kan pengennya yang cepet dan ada kepastian.

An : Apa yang menjadi faktor tidak dikeluarkannya izin reklame?

Ir : Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dikeluarkannya izin antara lain lingkungan keberatan dengan keberadaan reklame, reklame saling menutupi, mengganggu rambu-rambu lalu lintas atau rambu lalu lintas, reklame dekat dengan jembatan sehingga dianggap berbahaya.

An : Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman?

Ir : Kami sebagai biro juga sekaligus sebagai wajib pajak datang langsung ke kantor Dispenda untuk membayar pajaknya.

An : Bagaimana prosedur pendaftaran wajib pajak?

Ir : Kami mendaftar dulu kalo baru pertama kali menjadi wajib pajak, disana kami akan mendapat formulir pendaftaran wajib pajak dan

mengisi formulir sesuai dengan petunjuk, setelah itu maka akan diberi Nomor Peserta Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh bagian seksi pendaftaran dan pendataan.

An : Bagaimana prosedur pendataannya?

Ir : Setelah mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan dapat NPWP mengisi formulir data obyek pajak reklame yang nanti dijadikan pedoman untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

An : Bagaimana cara pembayaran pajak reklame Kabupaten Sleman?

Ir : Hanya dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang diserahkan kepada petugas di bagian loket paling depan

An : Apakah anda sebagai pihak ketiga dalam pemasangan reklame dan sekaligus sebagai wajib pajak reklame mengetahui cara penghitungan pajaknya?

Ir : Penghitungan pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, mengalikan faktor dasar pengenaan pajak reklame

An : Dimana pembayaran pajak reklame Kabupaten Sleman?

Ir : Di Dinas Pendapatan Daerah dan bisa lewat rekening bendahara Dispenda

An : Apakah biro iklan ini sudah melaksanakan pembayaran pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah?

Ir : Menurut Saya sudah karena Saya sendiri yang menyetorkan pajaknya ke Dispenda

An : Menurut anda apa yang menjadi alasan pemasang reklame di kabupaten sleman ini tidak melakukan izin dan membayar pajak?

Ir : Reklame di Kabupaten Sleman banyak yang tidak melakukan izin reklame, pendaftaran, pendataan, dan pembayaran pajak reklame dikantor Dispenda karena memang masih kurangnya pengawasan di lapangan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga masyarakat juga enggan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar kewajiban pajaknya. Kurang lebih 30% reklame di Kabupaten Sleman tidak melakukan pendaftaran dan pendataan, sehingga hal ini

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman.

#### **Lampiran 4**

#### **Transkrip Wawancara masyarakat pengguna fasilitas reklame di Kabupaten Sleman**

Nama : Heriyanto

Jabatan : Pengguna/pemasang reklame jenis baliho (papan nama)  
Jl.Gejayan

Waktu : 27 November 2012

An : Apakah pendirian dan pemasangan reklame yang anda lakukan atas izin Pemerintah Daerah?

Hr : gak mbak.

An : Mengapa tidak melakukan izin reklame dulu ke Pemda?

Hr : Dulu saya pernah mau ngurus ijin pasang billboard, tapi kok susah kesannya berbelit-belit, ijinnya lama masa satu bulan gak jadi, saya mau ngurus ijinnya jadi males.

An : Berarti kalau tidak izin gak membayar pajak ya?

Hr : gak bayar mbak, wong saya pasanganya cuma kecil kok, lagian saya gak tahu ngurusnya gimana, ijinnya dimana.

An : Apakah anda tau Peraturan daerah kabupaten Sleman yang mengatur tentang Pajak reklame?

Hr : ga hapal mbak

An : Apakah Anda mengetahui tempat pembayaran pajak reklame?

Hr : Biasanya kalo bayar-bayar pajak gitu kan di Dinas Pendapatan Daerah

An : Mengapa Anda tidak membayar pajaknya? Kan itu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah?

Hr : ya iya mbak saya tau dapat menambah pendapatan daerah, tapi saya tu pasanganya cm kecil e masa harus ribet ngurus izin sama bayar pajak

An : Apa faktor lain yang menyebabkan Anda tidak membayar pajak?

Hr : yaa selain mahal, ntar duitnya dikorupsi ga tu sama pejabatnya mbak,  
wong di Sleman kan banyak banget reklame.

## **Lampiran 5**

### **Hasil wawancara masyarakat pengguna fasilitas reklame di Kabupaten Sleman**

Nama : Irawan Santoso

Jabatan : Pengguna/Pemasang reklame jenis billboard (papan nama)  
Jl.Gejayan

Waktu : 4 Desember 2012

An : Apakah pendirian dan pemasangan reklame yang anda lakukan atas  
izin Pemerintah Daerah?

Is : izin mbak

An : Dimana anda melakukan perizinannya?

Is : Di Kantor Pelayanan Perizinan

An : Bagaimana prosedur perizinannya?

Is : yaa...mengajukan berkas dulu mbak, nanti dikasih syarat-syaratnya

An : Berapa lama izin dikeluarkan setelah berkas masuk?

Is : wah nyampe sebulan baru jadi mbak, harusnya 2 minggu kan langsung  
jadi.

An: Apakah anda tau Peraturan daerah kabupaten Sleman yang mengatur  
tentang Pajak reklame?

Is : Saya tau kalau ada Perdanya tp ga hapal mbak

An : Apakah Anda mengetahui tempat pembayaran pajak reklame?

Is : di Dinas Pendapatan Daerah

An : Apakah Anda membayar pajak reklame?

Is : Bayar mbak, cuma setahun habis perpanjang lagi gitu...

An : Apakah Anda mengetahui cara penghitungannya?

Is : Tau, kalau pas bayar itu Saya minta rinciannya, nanti sama bidang penetapan dikasih..

An : Apa bukti pembayaran yang Anda peroleh?

Is : Bukti pembayarannya surat setoran pajak daerah mbak

**Transkrip Wawancara masyarakat pengguna fasilitas reklame di  
Kabupaten Sleman**

Nama : Agung

Jabatan : Pengguna/pemasang reklame jenis baliho (papan nama)  
Jl.Colombo

Waktu : 12 Desember 2012

An : Apakah pendirian dan pemasangan reklame yang anda lakukan atas izin Pemerintah Daerah?

Ag : gak izin mbak...

An : Mengapa tidak melakukan izin reklame dulu ke Pemda?

Ag : Reklame yang saya pasang cuma kecil mbak, izin tu ngurusnya yang lama

An : Berarti kalau tidak izin gak membayar pajaknya Pak?

Ag : gak bayar mbak, saya pasanganya cuma kecil kok, pajaknya pasti juga mahal mbak

An : Apakah anda tau Peraturan daerah kabupaten Sleman yang mengatur tentang Pajak reklame?

Ag : ga hafal..

An : Apakah Anda mengetahui tempat pembayaran pajak reklame?

Ag : Biasanya bayar pajak di Dinas Pendapatan Daerah

An : Mengapa Anda tidak membayar pajaknya? Kan itu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah?

Ag : ya iya mbak saya tau, tapi banyak kok reklame yang gak bayar pajaknya soalnya cuma kecil-kecil

An : Reklame lebih dari 1x2 meter kan seharusnya sudah kena pajak Pak?

Ag : Ow iya to, Saya kira kalau Cuma 2 meter tu gak pajak. Soalnya banyak banget reklame di Sleman ini yang ukurannya kecil.